

## **BAB III**

### **KONFLIK INTERNAL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)**

#### **PADA TAHUN 2004-2013**

##### **A. Faktor Penyebab Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Keruntuhan “galaksi politik” orde baru berimbas pada terbukanya jalan imajinasi politik kaum terdidik yang rindu akan kondisi yang lebih demokratis, proses hibernasi politik kini telah terhenti dan hanya menjadi kenangan dalam ingatan para aktivis yang dahulu pernah terbungkam. Dengan kesadaran sosial politik, para aktivis masjid mulai memperlihatkan taji kepemimpinannya dengan berlomba-lomba mendirikan partai politik, akibatnya gerakan sosial politik islam mengalami degradasi makna politik yang terlampau jauh untuk dikembalikan, logika kompetisi elektoral menjadi salah satu kewajiban yang harus dipikirkan oleh partai guna memenangkan pertarungan politik pada perhelatan akbar lima tahunan, akan tetapi mereka tidak sadar bahwa manifesto politik islam tengah mengalami keretakan-keretakan di sana-sini, perdebatan antara mementingkan ideologi kepartaian dan mementingkan logika pasar telah membuat umat islam yang berada di partai terpecah belah, hal ini yang kini dihadapi oleh partai islam, termasuk didalamnya Partai Keadilan Sejahtera.

Keretakan yang terjadi di internal Partai Keadilan Sejahtera menyeruak mengisi setiap diskusi publik yang diselenggarakan diberbagai tempat, yang kemudian pada perkembangan selanjutnya hal ini dikonfirmasi dengan adanya

beberapa penelitian yang secara khusus mengkaji dan membedah mengenai ketegangan yang terjadi diinternal partai, ketegangan ini kemudian berubah menjadi konflik laten atau meminjam istilah Yusuf Supendi bahwa PKS kini tengah dirundung “perang dingin” yang tak berkesudahan, setidaknya hal ini bisa terlacak dari rentetan peristiwa yang terjadi di internal partai dalam kurun waktu 2004-2013 dan bahkan mungkin saja konflik ini bisa berlanjut pada tahun berikutnya atau bisa jadi konflik ini terhenti, dengan cara memberikan solusi alternatif guna meredam konflik agar tidak berdampak melampaui batas-batas kepartaian.

Maka dari itu, dalam bab ini penulis akan mencoba menjelaskan dan memaparkan prihal konflik yang terjadi di internal Partai Keadilan Sejahtera dalam rentang waktu 2004-2013. Penulis menggunakan rentang waktu yang panjang ini bukan berarti penulis hendak menjelaskan fase sejarah konflik yang terjadi di internal partai dalam kacamata deretan peristiwa layaknya buku sejarah, melainkan penulis hendak mengajak pembaca guna melihat konflik tidak hanya pada aspek luaran yang terjadi pada saat ini, tetapi lebih pada akar masalah yang kemudian bernetamorfosis menjadi gelombang besar yang mampu membuat partai kehilangan taji persatuan dalam menggaransi belantara politik di Indonesia

## **1. Sengketa Politik Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Antara Amien Rais-Siswono dan Wiranto-Salahuddin Wahid Pada Tahun 2004.**

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang berasaskan Islam dengan menjadikan dakwah sebagai alat perjuangan guna meraup suara ditengah gempuran partai-partai lain yang dianggap tidak mampu mewakili umat islam secara keseluruhan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, partai ini merupakan partai yang terbentuk dari sekumpulan aktivis kampus yang mengalami proses hibernasi politik akibat dari despotisme rezim Soeharto, yang pada saat itu lebih mengedepankan pada aspek stabilitas dan pembangunan, walaupun hal ini harus dibayar mahal dengan mengorbankan dan merenggut imajinasi politik mahasiswa akan kehidupan yang lebih demokratis baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Praktis, ketika kekuasaan dijadikan sebagai tameng pembenaran, aliran suara kritis mahasiswa terbungkam, mesjid adalah tempat yang paling logis guna mengumpulkan kekuatan penyeimbang dari ketidakberpihakan negara terhadap kondisi umat islam yang selalu dijadikan sebagai "anak bawang" kebijakan. Disinilah persemaian nalar intelektual dan dimensi keagamaan bercampur baur menjadi satu kesatuan yang dikemudian hari, gerakan surau ini menjadi salah satu gerakan yang patut diperhitungkan, terlebih lagi pasca runtuhnya rezim Soeharto, gerakan ini melakukan revitalisasi organisasi secara formil dengan menampakan diri sebagai partai politik yang bertujuan untuk mensintesiskan antara islam dan politik sebagai

Kekentalan Pemahaman keagamaan inilah yang pada perkembangan selanjutnya menjadi salah satu ciri terpenting guna mengidentifikasi partai politik yang mereka dirikan, dari mulai tahap kaderisasi sampai pada percakapan antar kader, mereka selalu menggunakan bahasa arab atau setidaknya menggunakan bahasa arab sebagai sempalan kata dalam kalimat yang mereka katakan. Tidak hanya itu saja, mereka pun terbiasa mengikuti pengajian, dakw'ah dan kegiatan-kegiatan lain yang kental akan nuansa keagamaan, hal ini mungkin merupakan fenomena yang sulit untuk kita temui pada partai-partai lain, terlebih lagi terhadap partai yang menegaskan dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai partai sekuler.

Namun, kesamaan dalam menjalankan aktivitas ini bukanlah tanpa perbedaan, perbedaan ini muncul ketika anggota partai memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda dengan semangat kepartaian yang landasi pada kepentingan umat, warna-warni pandangan politik pun selalu mengitari setiap musyawarah yang digelar oleh partai, hal ini dapat kita lihat ketika partai berencana untuk berkoalisi guna memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2004. Pada tahun ini pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang masuk dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden adalah

Tabel 3.1 Nama Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Nama Pasangan Capres dan Cawapres				
Wiranto- Salahuddin Wahid	Megawati- Hasyim Muzadi	Amien Rais- Siswono Yudo Husodo	Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla	Hamzah haz- Agum Gumelar

Mengingat, atas keputusan musyawarah ke II MSP PKS yang memutuskan untuk konsentrasi di parlemen, akhirnya MSP PKS dalam musyawarah ke III menugaskan tiga lembaga tinggi PKS yaitu DSP, MPP dan DPP PKS untuk melakukan *dirasah*, kajian kemungkinan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada putaran 1 tahun 2004. Disinilah bibit-bibit keretakan sudah mulai tumbuh dengan muncul istilah kubu Kali Malang yang mendukung Wiranto dan kubu Mampang yang mendukung Amien Rais, bahkan pada tahun 2005 salah satu tokoh PK menggunakan kata kubu keadilan dan kesejahteraan dalam mengidentifikasi polarisasi tersebut. Dalam musyawarah Lembaga Tinggi PKS (DSP, MPP dan DPP PKS) ke IV, baik secara aklamasi atau pemungutan suara yang dilakukan sebanyak delapan kali untuk memilih pasangan Amien Rais dan Siswono pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2004 tetap memilih Amien Rais sebagai calon yang akan di dukung oleh PKS, dengan rincian sebagai berikut<sup>143</sup>:

<sup>143</sup>Catatan Pribadi Yusuf Supandi Yang Diberikan Kepada Penulis Pada Tanggal 23 Maret 2013

Tabel 3.2 Hasil Musyawarah Penentuan Dukungan Partai terhadap Calon  
Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2004

Nama pasangan	Jumlah pemilih	Peresentase
Amien Rais–Siswono	28 orang	70%
Wiranto–Wahid	8 orang	20%
Hamzah Haz–agum	1 orang	2,5%
Abstein	3 orang	7,5%
Jumlah	40 orang	100%

Akan tetapi, keputusan sebanyak 8 kali yang dilakukan oleh 3 Lembaga Tinggi itu dianulir oleh Hilmi Aminuddin yang pada saat itu tidak hadir, Yusuf Supendi kemudian bercerita mengenai kronologis musyawarah itu kepada penulis, beliau mengatakan:

“Pada rapat tiga Lembaga Tinggi hari Selasa 22 Juni 2004 jam 17.00, Hilmi Aminuddin yang tidak hadir menelepon Abdullah Said Baharmus untuk menghentikan musyawarah 3 Lembaga Tinggi dan dilaksanakan Majelis Syura pada tanggal 27 Juni di Villa Anyer jam 09.00 pagi, sejumlah 39 anggota Majelis Syura sudah pada hadir di Villa Anyer. Akan tetapi, Hilmi Aminuddin tidak muncul padahal sudah berada dirumahnya di Anyer, maka terkatung-katunglah 39 anggota Majelis Syura itu, “kita disuguhin ikan otak-otak”, akhirnya Isya muncullah Hilmi dan dimulailah musyawarah Majelis Syura yang dipimpin ketua MPP, Rahmat Abdullah. Ketika awal sidang saya bertanya: apa dasar Al-Qur’an, Hadits, Sirah Nabawiyah, sejarah Ikhwanul Muslimin (IM) dan kebijakan lainnya yang menyatakan bahwa Hilmi Aminuddin (Muraqib Amm) memiliki hak dan wewenang mengilgoh (mengeliminir) delapan kali keputusan tiga Lembaga Tinggi dan dianulir sehingga dilakukan oleh Majelis Syura?”<sup>144</sup>.

Hasil pertemuan MSP PKS yang dilakukan di Villa Anyer tersebut tetap memilih pasangan Amien Rais-Siswono sebagai pasangan yang akan didukung oleh PKS untuk menjadi Presiden tahun 2004, Hal ini membuat kubu Kali Malang meradang akhirnya mereka membuat bayan atau penjelasan yang kemudian disebut sebagai bayan pertama dengan mengatasnamakan MPP PKS yang ditanda-tangani oleh KH. Rahmat Abdullah pada tanggal 28 juni 2004 yang menyebutkan, bahwa keputusan MSP PKS TIDAK TERIKAT. Akhirnya pimpinan tiga lembaga tinggi PKS (DSP, MPP dan DPP PKS) membuat bayan ke dua pada tanggal 29 juni 2004 guna mengeliminasi bayan illegal ke 1 yang menyalahi keputusan anggota MSP PKS pada musyawarah ke IV.

Dualisme bayan tersebut akhirnya diputuskan dengan tetap mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Amien Rais dan Siswono dalam pemilihan umum<sup>145</sup>, Dikarenakan bayan tersebut hanya ditujukan untuk internal PKS, terutama kader yang berada di daerah dan tentunya tidak berdampak pada perubahan koalisi partai yang sebelumnya sudah diputuskan dalam musyawarah yang cukup alot.

Menurut hemat penulis, dikeluarkannya bayan pertama memang bukan dimaksudkan untuk merubah hasil musyawarah, melainkan sebagai upaya untuk memecah suara kader PKS di berbagai daerah, yang dimaksudkan agar suara kader

tidak bulat tertuju pada pasangan Amien Rais dan Siswono, sehingga mengurangi besaran pendapatan suara pasangan yang didukung oleh PKS. Dan adapun koalisi partai pada pemilu putaran pertama tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Koalisi Partai Pada Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

Nama Pasangan Capres dan Cawapres	Partai Pendukung
Wiranto – Salahuddin Wahid	Golkar, PKB, PKPB, PPNUI, Patriot Pancasila
Megawati – Hasyim Muzadi	PDI P dan PDS
Amien Rais – Siswono Yudo Husodo	PAN, PBR, PSI, PNI Marhaenisme, PPDI, PNBK, PBSB dan <b>PKS</b>
Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla	Partai Demokrat, PBB dan PKPI
Hamzah haz – Agum Gumelar	PPP

Dampak dualisme bayan tersebut membuat kader yang berada di daerah kebingungan untuk memilih dan memilah bayan yang memang dibuat oleh Lembaga Tinggi PKS, kebingungan inilah menurut hemat penulis yang menjadi salah satu penyebab preferensi suara kader terdiaspora ke beberapa calon presiden yang mengikuti pemilihan umum, mari kita simak di bawah ini:



Tabel 3.4 Preferensi Pemilih PKS Untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden,  
Menurut Survey NDI LP3ES 2004<sup>146</sup>, yaitu sebagai berikut:

	Wiranto– Wahid	Megawati –Muzadi	Amien– Siswono	SBY– Kalla	Hamzah– Gumelar	Total
PKS	9%	9%	57%	24%	1%	100 %

Berdasarkan hasil survey di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa suara kader lebih banyak diberikan kepada pasangan Amien Rais dan Siswono dengan kisaran persentase sebanyak 57% dan peringkat kedua dalam preferensi kader PKS tertuju pada pasangan SBY-Kalla dan bukan kepada pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid sebagaimana tertuang dalam bayan pertama yang ilegal, hal ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Terbitnya dualime bayan menyebabkan kader di daerah tidak mendapatkan kepastian dalam memberikan hak suara yang sesuai dengan keputusan final internal partai.
2. Kelihayan SBY-Kalla dalam membangun citra politik di tengah masyarakat yang berimbas pada konversi hak suara yang dilakukan oleh kader PKS yang berada diberbagai daerah.

Selanjutnya, pada putaran pertama pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden, pasangan yang didukung oleh PKS tidak masuk dalam pemilihan umum pada putaran ke dua, dan adapun hasil dari pemilihan umum pada putaran pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden  
Pada Pemilihan Presiden Putaran I Tanggal 5 Juli 2004<sup>147</sup>

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara Sah Secara Nasional	% dari Total Suara Sah
1	Wiranto–Salahuddin Wahid	26.286.788	22,154
2	Megawati – Hasyim Muzadi	31.569.104	26,605
3	Amien Rais–Siswono	17.392.931	14,658
4	Susilo Bambang Yudhoyono –Jusuf Kalla	39.838.184	33,574
5	Hamzah haz–Agum Gumelar	3.569.861	3,009
6	Total Suara Sah Secara Nasional	118.656.868	
7	Total Suara Tidak Sah Secara Nasional	2.636.976	
8	Total Suara Sah dan Tidak Sah	121.293.844	
	Total Pemilih Tetap (SK KPU no. 39/2004 Tanggal. 1 Juni 2004	155.048.803	

Praktis, dikarenakan tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mencapai suara mayoritas, maka KPU mengadakan pemilihan umum putaran

<sup>147</sup> Ibid. Jon Jomanto, Dkk. "Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004. Dokumentasi Analisis

kedua dengan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara tertinggi dalam pemilihan umum pada putaran pertama, yaitu pasangan Megawati – Hasim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla.

Melihat pasangan calon yang didukung oleh PKS kalah dalam pemilihan umum pada putaran pertama, PKS kemudian melakukan musyawarah MSP PKS yang ke V guna menentukan pilihan untuk berkoalisi dengan salah satu kandidat diantara dua kandidat yang masuk dalam putaran ke dua pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden, akan tetapi dalam musyawarah ini terjadi pertentangan kembali diantara para anggota musyawarah, pertentangan ini menurut pendapat penulis merupakan dampak lanjutan dari pertentangan yang terjadi pada musyawarah yang dilakukan sebelumnya guna menentukan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum putaran pertama, besar kemungkinan para anggota musyawarah yang menolak berkoalisi pada putaran ke dua dikarenakan khawatir akan terjadi sabotase terhadap hasil keputusan musyawarah yang telah diputuskan seperti yang pernah terjadi dalam musyawarah MSP PKS ke IV. Setidaknya terdapat 6 orang anggota Majelis Syura yang menolak berkoalisi (musyarakah) dengan salah satu pasangan calon, Yusuf Supendi yang merupakan salah satu diantara 6 orang tersebut dengan sentai mengatakan kepada penulis “Ketika ditanya kenapa saya menolak

berkoalisi saya jawab dengan satu kata Ribet!”<sup>148</sup>, mereka yang menolak untuk berkoalisi diantaranya:

1. Yusuf Supendi
2. Mashadi
3. Dr. Azhami Syamiun Jazuli
4. Abdul Raqib Abdul Qodir
5. Madumaluh, dan
6. Sumanjaya<sup>149</sup>

Akan tetapi, musyawarah tetap berlanjut dan kemudian disepakati PKS berkoalisi dengan SBY-JK pada putaran ke dua pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden<sup>150</sup>, keputusan ini diambil oleh PKS, mengingat Megawati merupakan lawan politik yang yang harus dikalahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Anis Matta di dalam salah satu majalah:

“Kami berkepentingan mengalahkan Megawati, logis saja kami dukung yang menang”<sup>151</sup>.

Disamping matematika politik yang mencoba menghitung kans kemenangan kedua pasangan calon tersebut, isu mengenai Megawati yang tidak layak menjadi seorang presiden dikarenakan sosoknya sebagai seorang wanita pun tak ayal menjadi

<sup>148</sup> Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 23 Maret 2013

<sup>149</sup> Catatan Pribadi Yusuf Supendi Yang Diberikan Kepada Penulis Tanggal 23 Maret 2013

<sup>150</sup> Terlampir

<sup>151</sup> Lihat Majalah Tempo “Partai Keadilan Terbelah, Benarkan Petinggi PKS Menggelapkan Dana dari Adang Darajatun” Edisi 3 April 2011 Hal 35

perbincangan yang hangat di tengah para kader, isu yang senyatanya terjadi ini kemudian ditunggangi oleh sebagian pimpinan partai guna melegalkan dan menyatakan diri untuk berkoalisi dengan SBY-JK. Penulis berkeyakinan bahwa isu ini sengaja dihembuskan lalu kemudian ditunggangi oleh sebaigian para elite partai, dikarenakan prilaku politik yang ditunjukkan oleh PKS dalam mendukung pasangan calon presiden pada putaran kedua ini memang tidak didasarkan pada analisis reflektif gender, baik yang bersumber dari noktah agama maupun yang bersumber dari ruh kebudayaan, buktinya dikemudian hari PKS mendukung salah satu pasangan calon untuk menjadi kepala daerah di Kediri dengan calon pemimpin seorang perempuan, hal ini sebagai bentuk afirmatif bahwa PKS tengah menelan bulat ucapan dan prilaku politik yang cenderung timpang dan memihak terhadap salah satu pasangan dengan menjadikan isu gender sebagai alat guna menyerang dan mengendapkan kesetaraan gender dihadapan hukum sembari mencari dalil-dalil syar'i guna membangun dan membentuk argumentasi yang bersumber dari teks-teks normatif keagamaan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Salihul Fajri, beliau mengatakan:

“Di Kediri tempo hari ada kejadian kan perempuan didukung juga, nah memang itu politik setoran, nah itu siapa yang ngajarin, ya ketua MSP nya, U. Hilmi Aminuddin yang ngajarin”<sup>152</sup>.

Maka dari itu, kepentingan PKS untuk mengalahkan Megawati dalam pemilihan umum putaran kedua sebagaimana yang diutarakan oleh Anis Matta,

---

<sup>152</sup> Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 4 April 2013

menurut hemat penulis bukan dikarenakan sosok Megawati sebagai seorang perempuan yang bagi sebagian orang masih dianggap tabu, melainkan karena adanya mahar politik yang digelontorkan oleh Jusuf Kalla, calon wakil presiden yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dipanggil SBY.

Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Yusuf Supendi sebagai tokoh dari kubu keadilan yang menyatakan bahwa koalisi yang dilakukan oleh PKS pada putaran kedua dengan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tidak lain merupakan imbas dari penggelontoran dana mahar politik yang dilakukan oleh Jusuf Kalla terhadap partai yang mencapai 34 Milyar, sebagaimana yang diutarakan oleh Yusuf Supendi, beliau mengatakan:

“Disisi lain Lutfi Hasan Ishaq menurut informasi dari Hasan Al Basyir (alm) yang berasal dari Sudan yang bersumber dari Utsmal Al Bathery wartawan dari Al Zajirah menerima mahar dari Jusuf Kalla 34 Milyar, sah-sah saja jika dikatakan telah terjadi penjualan partai dengan istilah mahar, karena keputusan koalisi pada putaran ke dua oleh Majelis Syura di Depok. Akan tetapi Dewan Syariah meminta laporan penggunaan uang tersebut dan Lutfi Hasan Ishaq menolak dengan alasan harus izin dari Lembaga Tinggi, sangatlah merupakan tindakan mengabaikan prinsip proporsionalitas, Majelis Syura hanya dijadikan lembaga pencari uang”<sup>153</sup>.

Walaupun Dugaan Penggelontoran dana yang dilakukan oleh Jusuf Kalla terhadap partai bulan sabit kembar dengan untaian padi ini dibantah oleh Jusuf Kalla, akan tetapi, menurut hemat penulis sanggahan yang dilakukan oleh Jusuf Kalla ini tidak lebih sebagai upaya penutupan dan penghilangan jejak informasi keberadaan mahar politik yang terjadi diantara partai politik, dikarenakan keberadaan mahar

politik merupakan fenomena transaksi jual beli yang sudah menjadi rahasia umum dan tidak membutuhkan pembenaran yang berlebihan.

Dan adapun hasil pemilihan presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perolehan Suara Secara Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pada Putaran Pertama (5 Juli 2004) dan Putaran Kedua (20 September 2004)<sup>154</sup> adalah sebagai berikut:

Nama pasangan Capres dan Cawapres	Perolehan Suara Sah Pada Pilpres				(+) atau (-) dari Putaran 1 ke Putaran II
	Putaran I	%	Putaran II	%	
Megawati– Hasyim Muzadi	31.569.104	26,605	44.990.704	39,38	11.703.516 (+)
Susilo Bambang Yudhoyono– Jusuf Kalla	39.838.184	33,574	69.266.350	60,62	29.428.166 (+)
Jumlah Suara Sah Pilpres	118.656.868	100,00	114.257.054	100,00	

<sup>154</sup> Lihat Komisi Pemilihan Umum, Dik. "Berita Resmi Suara Pemilihan 2004, Dokumentasi Analisis

Tabel 3.7 Preferensi Pemilih PKS Untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Putaran ke II Menurut Survei IFES Oktober 2004<sup>155</sup>, yaitu sebagai berikut:

	SBY – Kalla	Megawati – Muzadi	Rahasia
PKS	86%	11%	3%

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa embrio konflik internal PKS bermula pada tahun 2004, setidaknya konflik ini terjadi pada musyawarah MSP PKS IV guna mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden, yang kemudian hasil dari keputusan MSP PKS dianggap tidak mengikat dengan dikeluarkannya bayan pertama, walaupun kemudian bayan ini dianulir dengan munculnya bayan kedua yang sah dan mengikat. Pertentangan ini berlanjut dalam musyawarah ke V yang dilakukan oleh MSP PKS guna mendukung calon presiden dan wakil presiden pada putaran kedua, disini sebanyak 6 orang anggota Majelis Syura yang mengikuti permusyawaratan menolak untuk berkoalisi dengan salah satu pasangan calon, kuat dugaan hal ini merupakan bukti ketidakpercayaan anggota musyawarah terhadap beberapa pimpinan yang tidak amanah dalam menjalankan dan mentaati keputusan musayawarah.

<sup>155</sup> Kurniawan, I. (2005). Laporan DPL “Perilaku Pemilih Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi Analisis



## **2. Konflik Persepsi dan Wacana dalam Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) di Bali Pada Tahun 2008**

Melambungnya suara PKS pada tahun 2004, mendorong sebagian elite PKS untuk lebih melakukan pendekatan politik kepada masyarakat luas guna mendorong perolehan suara partai pada tahun politik selanjutnya, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan oleh PKS tidak hanya melalui dalam bentuk dak'wah ataupun pengajian yang kental dengan golongan islam konservatif, tetapi juga melakukan pendekatan-pendekatan populis yang dapat menarik simpati dari masyarakat yang berada di luar lingkaran tersebut, tentunya marketing politik dan pencitraan partai merupakan ujung tombak dari gagasan ini. hal tersebut seolah mendapatkan pembenaran ketika PKS mengadakan acara Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) di Bali pada tahun 2008, walaupun kemudian menimbulkan pertentangan diantara kader dan elite partai, dikarenakan beberapa hal, diantaranya masalah tempat, bentuk logo dan gagasan partai terbuka yang kencang disuarakan pada saat acara Mukernas.

### **a. Tempat dan Logo Acara Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS)**

Pertentangan pemahaman antara kubu harakah (keadilan) dan kubu partai (kesejahteraan) sangat kentara dalam acara Mukernas ini, baik sebelum maupun sesudah acara dilangsungkan, kubu keadilan menganggap acara mukernas ini tidak layak dilaksanakan di Bali mengingat Bali merupakan Provinsi dengan mayoritas

agama Hindu, yang sudah barang tentu bersebrangan dengan jiwa dan semangat PKS yang kental akan nuansa keagamaan, khususnya islam, sebagaimana yang dikatakan Salihul Fajri, menurut beliau:

“Jadi kita mau merepresentasikan islam, seharusnya mencari tempat-tempat yang lebih islami la..kita tahu di sana itu apa? Ustad-ustad dibawa kepantai.. apa yang mau dilihat kesana?<sup>156</sup>”

Apa yang dikatakan oleh Salihul Fajri ini mengindikasikan bahwa Bali merupakan Provinsi yang tidak layak dijadikan sebagai tempat acara Mukernas, dikarenakan tidak sesuai dengan garis dan cita-cita yang diemban partai, terlebih lagi untuk partai islam yang mengagungkan prinsip kesederhanaan dan keislaman yang jauh dari perbuatan *isrof* (berlebihan). Bahkan ada sejumlah tokoh dan kader yang berada diberbagai daerah mengemukakan ketidaksetujuannya dengan melayangkan surat kepada pimpinan pusat PKS<sup>157</sup>, setidaknya dalam surat itu ada tiga hal yang mereka soroti, yaitu:

1. Keputusan menetapkan acara Mukernas di Bali bukti sangat lemahnya “*sense of crisis*” yang dimiliki pimpinan PKS.
2. Para pemimpin partai yang suka berfoya-foya dan bermewah-mewah yang berlawanan dengan nilai-nilai da’wah yang diperjuangkan.

3. Menempatkan acara acara Mukernas diadakan di daerah Jember

Ketidaksepakatan yang dilakukan oleh kubu harakah (keadilan/ideologis) ini tidak berarti dapat menganulir keputusan yang sudah diputuskan oleh pimpinan PKS, yang dalam hal ini kubu partai (kesejahteraan/pragmatis), dikarenakan kubu partai menganggap bahwa melangsungkan acara Mukernas di Bali adalah salah satu upaya taktik strategis guna memperluas ceruk pasar yang selama ini terkungkung oleh golongan islam *an sich*, kubu partai menganggap berlangsungnya acara Mukernas di Bali merupakan lompatan besar yang dilakukan oleh partai sebagai bagian strategi elektoral guna merebut dan mengambil basis-basis pemilih yang selama ini tidak tersentuh oleh partai. Seperti pernyataan Tifatul Sembiring dalam jumpa pers sebelum pembukaan acara Mukernas berlangsung, beliau menyatakan:

“PKS menargetkan perolehan suara 20 persen pada pemilu 2009”<sup>158</sup>.

Secara langsung maupun tidak langsung, pernyataan yang dinyatakan oleh Tifatul Sembiring seolah-olah membenarkan sangkaan yang ditujukan kepada PKS, bahwa PKS tengah memperluas ceruk pasar electoral yang selama ini kental dengan umat islam sebagai basis pemilih.

Di samping tempat acara Mukernas yang dianggap telah menyalahi koridor keislaman, logo dalam acara Mukernas pun tidak luput dari kritikan kubu harakah (keadilan/idealis) karena dianggap menyerupai pura, menurut Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPW PKS Bali, Mochamad Suhaimin Sutarmadi:

<sup>158</sup>Lihat ‘Omeit Busharuddin Muhtadi “Dilema PKS Suara dan Syariah” Hal 226





hal ini dilakukan dengan maksud agar partai tidak terkesan tertutup pada golongan lain selain dari pada umat islam yang selalu menjadi basis elektoral partai selama ini. sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfudz Shidiq dalam salah satu harian umum:

“PKS juga akan membuka diri pada calon legislatif (caleg) dari kalangan non muslim, itu merupakan langkah sttrategis politik untuk memperbesar partai. Kini kami menjadi partai terbuka”<sup>163</sup>.

Mengenai calon legislatif (caleg) dan pengurus non muslim, Tifatul Sembiring menambahkan:

“Setiap warga negara berhak atas itu asalkan memenuhi persyaratan dan prosedur PKS. Hal ini telah termuat dalam AD/ART partai”<sup>164</sup>

Senada dengan pernyataan Tifatul Sembiring, ketua DSP PKS, Surahman Hidayat mengatakan:

“Bila PKS menjadi terbuka, maka siapapun boleh menjadi anggota dan pengurus PKS, bahkan duduk mewakili partai di legislatif, yang penting yang bersangkutan memiliki komitmen dengan partai”<sup>165</sup>.

Wacana perubahan partai menjadi terbuka yang dihembuskan oleh sekelompok elite, sebenarnya merupakan isu dan wacana yang terlalu berani, mengingat selama ini basis pemilih PKS berasal dari golongan umat islam fundamentalis, sehingga wacana ini dapat mengaburkan identitas partai tidak lagi menjadi partai islam tetapi menjadi partai tengah yang tidak jelas statusnya. Dan tentunya wacana ini dikhawatirkan dapat berdampak pada berkurangnya elektabilitas partai yang bersumber dari umat islam, walaupun tidak menutup

<sup>163</sup>Lihat Harian Umum Rakyat Merdeka Tanggal 8 Februari 2008 Hal 8

<sup>164</sup>Lihat Harian Umum Republika Tanggal 8 Februari 2008 Hal 12

<sup>165</sup>Lihat Harian Umum Republika Tanggal 1 Februari 2008 Hal 3

kemungkinan partai mendapatkan suara dari golongan lain yang berada di luar pakem pemilih. Akan tetapi, hal ini ditampik oleh Hidayat Nurwahid, beliau mengatakan:

“Hal ini tak akan mungkin terjadi, selama ini kaum muslimin memberikan dukungan kepada PKS lebih melihat kepada prilaku dan sepak terjang para pengurus dan figur-figurnya”<sup>166</sup>

Akan tetapi pendapat sebagian elite dan tokoh partai yang menyatakan PKS menjadi partai terbuka ini kemudian ditampik oleh kubu harakah (keadilan/ideologis) yang berada di PKS, bahkan ada seorang tokoh partai yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat yang liar, karena PKS merupakan partai da'wah, sehingga partai mustahil menjadi partai terbuka layaknya partai-partai lain yang terbebas dari segmen keagamaan tertentu. Menurut Mashadi:

“Sejak awal PKS mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah, keanggotaan non-muslim tidak bisa ditolerasi, apalagi jika mereka benar-benar ditunjuk pejabat publik di parlemen maupun pemerintahan, melalui jalur partai”<sup>167</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Mashadi memang cukup beralasan, dikarenakan setiap orang yang berkeinginan untuk menjadi kader PKS harus melalui jalur kaderisasi yang kental akan nuansa keislaman, terlebih lagi ketika seorang kader naik dalam setiap tahapan kaderisasi, maka kader tersebut harus mengucapkan bai'at yang diawali dengan kalimat Syahadat, sehingga kecil kemungkinan atau bahkan tertutup kemungkinan banyak kader yang berasal dari non-muslim. Dan adapun caleg dari non muslim yang berada di wilayah timur kepulauan Indonesia, itu hanya dijadikan sebagai instrumen guna mendapatkan suara pemilih dari non muslim,

<sup>166</sup>Lihat 'Opcit Harian Umum Republika Hal 12

<sup>167</sup>Lihat 'Opcit Burhanuddin Muhtadi "Dilema PKS Suara dan Syariah" Hal 229

dikarenakan kans yang dimiliki caleg dari kalangan umat muslim sangatlah kecil, mengingat mayoritas pemilih bukan berasal dari pemilih umat islam.

Sanggahan itu pun muncul dari Yusuf Supendi, menurut Yusuf Supendi merubah partai menjadi terbuka adalah illegal, manipulasi fakta dan kebohongan<sup>168</sup>, beliau menambahkan bahwa isu yang dihembuskan ini berasal dari Hilmi Aminuddin yang mengacu kepada pernyataan Hilmi Aminuddin di dalam HU Republika pada tanggal 8 februari tahun 2008 yang selanjutnya dikemukakan pada tanggal 20, 21 dan 22 juni tahun 2010 pada saat acara Munas ke 2 di Jakarta, ketika itu Hilmi Aminuddin mengatakan, keterbukaan PKS sebenarnya telah dideklarasikan sejak Mukernas 2008<sup>169</sup>. Petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Masalah Partai terbuka itu kebohongan yang dilakukan oleh Hilmi Aminuddin, coba kamu (penulis) cari di HU Repulika tanggal 8 februari tahun 2008 dan tanggal 20, 21 dan 22 juni 2010”<sup>170</sup>.

Tuduhan kebohongan yang dilakukan oleh Yusuf Supendi terhadap Hilmi Aminuddin ini mendapatkan pembenaran dari salah seorang mantan petinggi PKS yang berada di daerah, menurut Salihul Fajri:

“Seharunya ketua Majelis Syura menyuarakan hasil Majelis Syura, lalu kenapa ketua Majelis Syura berbeda pendapat dengan Majelis Syura? Itukan dengan jelas-jelas Majelis Syura tidak ada wacana (tentang partai terbuka), ada gg di Majelis Syura? Itu bisa ditanya ke surahman..Gimana ketua Majelis Syura bisa dibilang illegal sama petinggi partai semuanya kan, gimana ceritanya”<sup>171</sup>.

<sup>168</sup>Lihat Yusuf Supendi “Replik Pengadilan Yusuf Supendi Menggugat Elite PKS”, Mushaf, Jakarta, 2012 Hal 14

<sup>169</sup>Lihat [Http://www.Voa-Islam.Com](http://www.Voa-Islam.Com) yang diakses pada tanggal 5 April 2013

<sup>170</sup>Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 23 Maret 2013

<sup>171</sup>Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 4 April 2013



Pertentangan antara kubu harakah dan kubu partai tentang istilah “partai terbuka” ini memaksa 3 lembaga tinggi partai untuk mengeluarkan bayan atau penjelasan mengenai wacana PKS menjadi partai terbuka<sup>172</sup>, hal ini dilakukan oleh lembaga tinggi PKS guna meredam gejolak kader yang berada di berbagai daerah, setidaknya ada 4 hal penting yang termaktub dalam bayan ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Slogan resmi partai adalah Bersih, Peduli dan Profesional.
2. Istilah “terbuka” TIDAK PERNAH menjadi keputusan partai, baik oleh sidang-sidang Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) maupun Khitob Qiyadi (arahan pimpinan)
3. Seluruh jajaran struktur, pengurus dan kader supaya tidak mewancanakan isu “partai terbuka”.
4. Mengenai Caleg dan pengurus non muslim: Setiap warga negara dapat menjadi Caleg (calon legislatif) atau pengurus PKS dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan dan aturan resmi partai.

### **3. Kemewahan versus Kesederhanaan**

M. Natsir adalah sosok yang sederhana, kesederhanaannya terlihat ketika beliau tidak segan-segan untuk memakai kemeja kusam dan jas tambalan, bahkan berkat kesederhanaannya beliau pun tidak segan-segan menolak dengan santun mobil

<sup>172</sup> M. Natsir, “Partai Terbuka” Terkemuka

Chevrolet pemberian pengusaha yang pada saat itu termasuk dalam kategori mobil mewah, padahal di rumah sederhananya hanya ada mobil Desoto rombeng tua yang sudah kurang pantas dipakai oleh politisi sekaliber nasional sebagai Menteri Penerangan. Kesantunan dalam bertutur kata dan kesopanan dalam berperilaku yang ditunjukkan oleh M.Natsir tidak membuat beliau tertunduk dalam perdebatan, beliau tidak segan-segan beradu argumen dengan lantang dan jelas, beliau adalah sosok yang mampu menginspirasi bangsa ini, setidaknya bagi penulis, di samping Tan Malaka yang penulis kagumi sebagai sosok yang pantang tertunduk dalam negosiasi.

Maka tak salah bila Daniel Lev, seorang indonesianis kenamaan, berkali-kali mengingatkan generasi muda Indonesia. Bila ingin mempelajari semangat berdemokrasi serta kehidupan politikus yang bersih dan bersahaja tak perlu menoleh jauh-jauh ke Eropa atau Amerika, "pelajari saja masa demokrasi pada 1950-an"<sup>173</sup>.

Menurut hemat penulis, politik santun yang dibalut dengan kesederhanaan itulah yang kini dirindukan oleh bangsa Indonesia setelah 67 tahun merdeka, akan tetapi, pembelajaran sikap politik yang diperagakan oleh politisi terdahulu dianggap oleh politisi sekarang sebagai barang yang sudah usang dan tidak mungkin untuk dilakukan pada zaman ini, seolah contoh sikap politik tersebut hanyalah layak dijadikan sebagai fosil sejarah yang berputar dalam wilayah mimpi.

Barangkali apa yang dikatakan penulis tidaklah berlebihan ketika kita melihat kondisi politik Indonesia yang penuh dengan skandal beruntun antar politisi yang

<sup>173</sup>Lihat Majalah Tempo "Politik Santun Di antara Dua Barisan" Edisi 14-20 Juli 2008 Hal 18.

dibumbui oleh kemewahan duniawi, tentunya hal ini jauh dari kata santun ditengah kemiskinan menganga lebar membedah antara golongan orang kaya dan perkumpulan orang miskin. Tidak perlu jauh-jauh mengarah pada partai yang bermuansa sekuler, partai yang menegaskan diri sebagai partai islam pun tak luput dari prilaku ini, sikap bermewah-mewahan ala PKS terlihat dari prilaku pimpinan partai kubu kesejahteraan (pragmatis) yang dengan percaya diri memperlihatkan kemewahannya, seolah-olah tidak ada tanggungan diantara harta yang dimilikinya dan ironisnya prilaku ini dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Sujana:

“Adapun mereka seperti itu bermewah-mewah wajar lah karena klo dibanding dengan politikus yang lainnya itu sangat jauh. Mereka seperti itu hanya untuk menyesuaikan saja karena mereka yang diutus untuk menjadi dewan itu mereka yang memiliki pekerjaan yang harus disesuaikan dengan lingkungannya”<sup>174</sup>.

Dalih pembenaran yang dilakukan oleh responden diatas dengan menjadikan rutinitas sebagai alasan utama, merupakan pernyataan yang menisbikan keberadaan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini berbeda dengan kubu harakah yang hidup dalam kesederhanaan. Ketika penulis mendatangi rumah Yusuf Supendi, penulis tidak melihat kemewahan yang mencolok dari beliau, dengan berseragam sarung corak dan kaos kerah putih beliau menyambut penulis, ditengah perbincangan, beliau mengatakan kepada penulis:

---

<sup>174</sup>Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 12 Maret 2013

“Minggu kemarin mashadi ke sini dengan pake motor matik China, tapi saya engga tau mereknya apa, dia tuh orang yang bersahaja”<sup>175</sup>.

Perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh kubu harakah dan kubu kesejahteraan ini yang menjadi pertanyaan ditengah masyarakat luas, jam rolex Anis Matta dan Villa mewah ala Hilmi Aminuddin menjadi awal mula perhatian media terhadap jurang kemewahan diantara petinggi PKS. Anis Matta mengatakan:

“Lebih kepada kepantasan. Jam tangan Rolex hanya sebagai aksesoris bukan hobi,<sup>176</sup>”

Kubu keadilan menduga bahwa kekayaan yang dimiliki oleh kubu kesejahteraan merupakan akumulasi kapital yang bersumber dari prilaku-prilaku yang kontra produktif dengan semangat dakwah yang selama ini menjadi “barang dagangan” partai. Dugaan yang paling logis yang dilontarkan oleh kubu keadilan adalah dengan mengaitkan ketersandungan petinggi dan elite partai terhadap berbagai kasus sebagai pintu masuk guna menganalisis pelipatgandaan kekayaan yang dilakukan oleh kubu kesejahteraan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Suspendi:

“Hilmi pulang setelah lulus kuliah di Arab Saudi hanya mengontrak rumah di Tanah Abang dan memiliki motor. Lalu pada tahun 1990-an, ia pindah ke Cipinang. Tahun 1995, Hilmi baru membangun rumah di Cipinang. Dalam ingatan Yusuf, tahun 2003 hingga 2004, Hilmi dan keluarga belum hidup berkecukupan. Sang istri masih berjualan jilbab dan baju muslim di Kalimalang. Mulai tahun 2004-an, kekayaan Hilmi meningkat pesat. Setelah memiliki Vila di Anyer, Hilmi kemudian membangun

---

<sup>175</sup>Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 23 Maret 2013

<sup>176</sup>“Lebih kepada kepantasan. Jam tangan Rolex hanya sebagai aksesoris bukan hobi,<sup>176</sup>”

Vila mewah di Lembang, Bandung. Vila di Bandung inilah yang belakangan menjadi gunjingan”<sup>177</sup>.

Di samping itu, Mashadi pun mengomentari tentang pameran kemewahan yang dilakukan oleh kubu kesejahteraan, beliau mengatakan:

“Itu sudah menjadi sikap kolektif PKS pemujaan terhadap harta, kemewahan sudah menjadi sikap. Anis Matta membangun rumah di Utan Kayu tingkat tiga itu, tidak masuk akal. Kalau memiliki akal sehat tidak berbuat seperti itu”<sup>178</sup>

Perbedaan kekayaan inilah setidaknya yang menjadi buah bibir di tengah masyarakat, partai yang seharusnya berada diantara masyarakat yang mengalami kesusahan ini malah memamerkan kekayaan pribadi yang jauh dari kata kesantunan, terlebih lagi penyakit ini menghinggapi partai yang menegaskan dirinya sebagai partai islam, suatu perilaku yang tidak terpuji. Sebagaimana yang dikatakan oleh oleh K.H Kholil Ridwan:

“Mungkin (Israf) tidak haram, tapi Allah tidak suka”<sup>179</sup>

#### **4. Perbedaan Pemahaman Mengenai Orientasi dan Khittah Perjuangan Partai.**

Partai merupakan organisasi politik yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara melalui mekanisme pemilihan umum, pada tataran ini partai harus mampu “menjual diri” kepada masyarakat luas agar masyarakat bisa simpati dan memilih partai, bahkan tak jarang partai menghalalkan segala cara agar

<sup>177</sup>Lihat <http://www.surabayapost.co.id> yang diakses pada tanggal 3 April 2013

<sup>178</sup><http://www.globalmuslim.web.id> yang diakses pada tanggal 3 April 2013

<sup>179</sup><http://islampos.com> yang diakses pada tanggal 3 April 2013

mendapatkan kepentingan politik tersebut. Fenomena seperti ini merupakan fenomena yang lumrah terjadi dalam dunia perpolitikan, proses politik dengan mekanisme menghalalkan segala cara merupakan salah satu jalan yang ditempuh di tengah menguatnya ketidakpercayaan publik terhadap partai politik sebagai organisasi yang hendak memerjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Hal ini pun yang kini menjangkiti PKS, pada mulanya PKS merupakan partai politik yang bertujuan untuk membumikan islam dengan menjadikan dakwah sebagai alat perjuangan dan kekuasaan hanyalah hadiah yang diberikan oleh Allah atas segala pengabdian yang telah dilakukan. Itulah setidaknya yang menjadi dasar pemikiran pembentukan PK/PKS pada awal-awal berdiri, akan tetapi hal ini telah berganti seiring dengan berubahnya orientasi kepartian yang lebih menekankan pada aspek kekuasaan ketimbang dengan dakwah, bahkan belakang kita melihat mimbar dakwah hanya dijadikan sebagai komoditas politik guna menarik simpati masyarakat di Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Endro Nugroho Laksono:

“Kita yakin Pilkada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gubernur yang didukung PKS bakal menang, dan PDI akan kalah”<sup>180</sup>.

Disinilah terjadi pertentangan diantara kubu harakah dan kubu hizb, kubu harakah menganggap bahwa mengutamakan dakwah lebih penting dari pada mendapatkan kekuasaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ridho:

“PKS tak perlu terlalu besar, cukup 3 persen saja, yang penting lolos *parlementary threshold*, tapi istiqomah memerjuangkan umat”<sup>181</sup>.

<sup>180</sup>Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 15 Maret 2013

Pernyataan Abu ridho ini menyiratkan dengan jelas bahwa mengutamakan kepentingan umat merupakan sesuatu hal yang penting ketimbang mendapatkan kekuasaan yang bersifat sementara, karena sejak semula PKS didirikan untuk menegakan *asma* Allah. akan tetapi hal itu berubah ketika ada segelintir elite partai yang mulai masuk dalam kubangan politik pragmatis. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfudz Shidiq, beliau mengatakan:

“Kami tidak ingin menjadikan islam sebagai jualan utama”<sup>182</sup>.

Dari pernyataan di atas kita dapat melihat bahwa kubu kesejahteraan yang dalam hal ini diwakili oleh Mahfudz Sidiq, menempatkan umat islam hanya sebagai alat guna mendongkrak perolehan suara dalam pemilu, di samping itu pernyataan ini pun baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencederai perasaan umat islam yang selama ini selalu menjadi partner politik yang loyal terhadap partai dalam setiap pemilihan umum. Hal ini tentunya menyingkapkan tabir yang selama ini menjadi pertanyaan di tengah masyarakat bahwa pada hakikatnya semua partai politik termasuk PKS, dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan dan mimbar dakwah hanya dijadikan sebagai instrument guna menarik suara pemilih dari umat islam. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Salihul Fajri, beliau mengatakan:

“Mereka itu memperjual belikan Ikhwan untuk mendapatkan simpati untuk mengumpulkan ulama-ulama yang soleh tadi agar tidak keras terhadap pemerintah, tidak keras dengan kekafiran, yang terjadi mereka sekarang Cs-an di dewan

---

<sup>181</sup>Lihat ‘Opcit Burhanuddin Muhtadi “Dilema PKS Suara dan Syariah” Hal 217

<sup>182</sup>“Burhanuddin Muhtadi “Dilema PKS Suara dan Syariah” Hal 217

merampok duit rakyat rame-rame, BLBI, APBN mereka korupsi rame-rame, itu kan aneh partai islam qo gitu kelakuannya”<sup>183</sup>

Perubahan orientasi kepartaian inilah yang menyebabkan banyak kader senior yang berada dipartai keluar atau bahkan dikeluarkan oleh kubu pragmatis yang dianggap tidak memiliki keluwesan dalam berpolitik. Pertentangan pemahaman mengenai orientasi partai ini setidaknya yang menjadi salah satu embrio dari sengketa politik yang terjadi di internal Partai Keadilan Sejahtera. Sungguh sangat disayangkan, partai politik yang dijejali oleh kaum terdidik dan memiliki ilmu keagamaan yang kuat kini telah berubah wujud tak lebih dari partai politik non agamis yang haus akan kekuasaan.

#### **5. Perbedaan Persepsi Tentang Pencapaian Politik PKS Pada Pemilihan Umum Tahun 2009.**

PKS adalah partai islam yang digadang-gadang memiliki kans yang besar diantara partai islam lainnya guna memenangkan pemilihan umum di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Ketua DPD Aceh Selatan, Fajri Ismail:

“Ada prediksi dari pengamat bahwa PKS ini akan menjadi 3 partai besar pada pemilu 2014, dan ada satu informasi dari intelegen, intelegennya itu bukan intelegen Indonesia malah dari luar, bahwa diprediksi PKS ini akan menjadi partai no 1 di Indonesia”<sup>184</sup>.

Hal tersebut mungkin bisa saja terjadi, mengingat PKS merupakan satu-satunya partai Islam yang memiliki grafik peningkatan yang luar biasa di tengah keterpurukan partai islam yang mengalami penurunan dalam setiap pemilihan umum.

<sup>183</sup>Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 4 April 2013

<sup>184</sup>Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 13 Maret 2013



Penurunan jumlah pemilih pada setiap pemilihan umum terhadap partai islam sebenarnya memiliki hubungan kausalitas terhadap peningkatan jumlah pemilih diantara partai nasionalis. Hal ini bisa terlihat pada tahun 2009 ketika PKS mengalami penurunan jumlah pemilih, walaupun secara politis mengalami peningkatan dalam jumlah kursi yang didapatkan. Mari kita simak di bawah ini:

Tabel 3.8 Jejak Capaian Politik PK dan PKS<sup>185</sup> adalah sebagai berikut:

	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009
Suara	1,43 juta	8,32 juta	8,2 juta
Persentase suara sah	1,5 %	7,34 %	7,88 %
Kursi di DPR	7 kursi	45 kursi	57 kursi

Penurunan jumlah suara PKS pada tahun 2009 bukan disebabkan pemilih melakukan konversi suara kepada partai islam lain, dikarenakan secara umum partai islam mengalami penurunan elektoral, kemungkinan terbesar pemilih memberikan hak suaranya kepada partai nasionalis yang pada saat itu mengalami peningkatan yang cukup berarti, seperti partai Demokrat dan dua partai nasionalis baru yaitu Hanura dan Gerindra.

Perbedaan pandangan antara kubu harakah dan kubu partai mengenai Penurunan dan peningkatan capaian partai pada pemilu 2009 disebabkan karena

<sup>185</sup>Lihat Majalah Gatra "Politik Daging Sapi" edisi 7-13 februari 2013 Hal 25

logika dan nalar yang dibangun berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, Di satu sisi kubu harakah menganggap PKS mengalami penurunan dikarenakan peningkatan partai tidak dilihat dari jumlah kursi yang dicapai, sebagaimana yang disampaikan oleh Yusuf Supendi, beliau mengatakan:

“Saya melakukan penghitungan dan perkiraan berdasarkan hasil pemilu 2004 45 kursi, 2009 57 kursi. Secara politis meningkat tambahan kursi tapi senyatanya merosot 120 ribuan, suara kader 1 juta berarti suara yang mengambang 7 juta, klo dirata-ratakan yang 8 juta itu 8 persen, berarti kader hanya dapat 1%, maka sangat berat kader itu mendulang suara 2,5%, dalam sejumlah siaran dinyatakan saya PKS mendapatkan 2%, dan menurut salah satu Kader Ahli dan masih di partai, jika mendapatkan 2% mu’zizat”<sup>186</sup>

Perhitungan yang dilakukan oleh Yusuf Supendi atau dalam hal ini kubu harakah bukan berpatok pada seberapa besar jumlah kursi yang didapatkan oleh PKS melainkan seberapa banyak pemilih yang memberikan suara kepada partai, dikarenakan dari situlah partai bisa melihat kekuatan yang sebenarnya. Akan tetapi, hal itu berbeda dengan pandangan kubu partai yang menganggap PKS mengalami peningkatan pada tahun 2009, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Sujana, beliau menyatakan:

“Satu satunya partai yang terus naik di samping Demokrat adalah PKS, baik itu 2004 atau 2009 kita naik terus dan pada tahun 2009 kita peringkat ke empat , satu satunya dari partai islam”<sup>187</sup>.

Untuk lebih memperjelas permasalahan peningkatan dan penurunan partai dalam pemilihan umum, alangkah baiknya jika kita membandingkan pencapaian politik PKS dari 3 kali pemilihan umum yang diikuti oleh PKS, yaitu sebagai berikut:

<sup>186</sup>Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 23 Maret 2013

<sup>187</sup>Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 15 Maret 2013



Jika dihitung berdasarkan tahun politik, maka kader PKS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan rasio anggota terhadap pemilih, setidaknya hal ini terjadi dikarenakan 3 hal, yaitu:

a. Menurunnya Loyalitas Kader Terhadap Partai.

Menurunnya loyalitas kader menjadi salah satu sebab terjadinya penurunan rasio anggota terhadap pemilih, hal ini sangat terlihat pada tahun 2004-2009, pada tahun ini penurunan rasio pemilih terhadap anggota kurang lebih sebesar 21 orang, penurunan ini terjadi dikarenakan pada rentang waktu antara tahun 2004-2009 terjadi dinamika diinternal PKS yang melibatkan para pertinggi partai, diantaranya perbedaan pandangan mengenai capres 2004, kontroversi iklan politik PKS yang menggambarkan Soeharto sebagai salah satu dari 8 guru bangsa pada tahun 2008, Iklan politik yang menayangkan wanita yang tidak berbusana muslim dan lain sebagainya.

b. Menurunnya Citra Politik PKS Dihadapan Publik.

Menurunnya citra politik PKS tidak bisa dilepaskan dari pemberitaan politik yang ditayangkan oleh berbagai media elektronik mengenai PKS, kasus-kasus yang mulai menjangkiti PKS serta dugaan keberadaan mafia politik di tubuh PKS dan

### c. Perpindahan Suara Pemilih

Menurunnya suara PKS terutama pada tahun 2009 merupakan imbas dari meningkatnya suara partai Nasionalis, pemilih yang sebelumnya memilih PKS tidak berpindah ke partai islam lainnya, dikarenakan partai islam pun secara keseluruhan mengalami penurunan yang tajam. Hal ini setidaknya dapat menjadi bukti bahwa politik aliran telah luntur di Indonesia, dikarenakan masyarakat lebih rasional dalam memilih, sehingga lebih memberikan hak suaranya pada partai/figur yang memang dianggap memiliki program realistis dan memiliki visi misi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Inilah setidaknya yang menjadi pangkal dari perbedaan persepsi yang terjadi di internal PKS yaitu mengenai pencapaian politik partai pada tahun 2009, antara peningkatan jumlah kursi dengan penurunan jumlah pemilih yang berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah kader.

## **B. Dampak Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

### **1. Faksionalisasi Internal Partai Antara Kubu Keadilan dan Kubu Kesejahteraan.**

Faksionalisasi merupakan suatu keniscayaan ketika organisasi mulai tumbuh dan berkembang, terlebih lagi organisasi yang sudah besar, faksionalisasi internal semakin terbuka lebar dikarenakan setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan kemudian perbedaan itu mengerucut menjadi pola yang saling bersebrangan. Hal ini pun yang terjadi di internal PKS

faksionalisasi antar elite partai terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan persepsi mengenai substansi kepartaian antara menempatkan partai sebagai sebuah organisasi politik yang menjadikan dakwah sebagai alat politik atau menempatkan partai sebagai organisasi dakwah dengan menjadikan politik sebagai jalan guna memperluas kepentingan dakwah kepada umat, singkatnya dakwah dijadikan sebagai panglima dan politik hanyalah jalan yang ditempuh oleh partai guna membumikan ruh keislaman.

Perbedaan pandangan dalam menempatkan substansi kepartaian ini yang kemudian menjadi pertentangan diantara para kader senior partai, bahkan belakangan pertentangan ini menjadi suatu konflik yang tidak sehat, hal ini terlihat ketika ada segelintir petinggi partai yang dengan keleluasaan kekuasaan yang dimilikinya berupaya meredam suara-suara kritis bernada sumbang tersebut, dengan jalan menyingkirkan kader yang dianggap telah menyalahi koridor kepartaian sebagaimana mestinya.

Hal inilah yang menyebabkan faksionalisasi diinternal PKS, faksionalisasi ini sebenarnya lebih bersifat dinamis, sehingga sulit untuk mengelompokannya secara rigid dikarenakan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada intensitas dan kualitas infiltrasi konflik yang terjadi di PKS, akan tetapi setidaknya faksionalisasi yang terjadi di PKS dapat diidentifikasi dalam 2 bentuk, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Penamaan kedua kubu tersebut sudah berlangsung lama setidaknya dari tahun 2005 dan muncul kembali pada tahun 2008 serta sekarang pada tahun

2013. Untuk lebih memperjelas prihal ini, penulis akan menyajikan perbedaan yang mendasar dari kedua kubu tersebut. Mari kita simak dibawah ini:

Tabel 3.10 Ikhtisar “Kelompok Idealis” versus “Kelompok Pragmatis”<sup>189</sup>.

No	Aspek	Kelompok Idealis	Kelompok Pragmatis
1	Penyebutan publik	Faksi Keadilan	Faksi Kesejahteraan
2	Proporsi	Relative banyak, tapi cenderung “ <i>silent</i> ” dan pasif.	Relative lebih sedikit, tapi cenderung vocal dan aktif
3	Icon/representasi	Yusuf Suspendi, Hidayat Nur Wahid	Hilmi Aminuddin dan Anis Matta
4	Beberapa Pandangan		
	Gaya hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Islam mengajarkan kesederhanaan, sehingga hal tersebut harus tetap menjadi ciri para kader PKS.</li> <li>➢ Memandang “kelompok Pragmatis” menunjukkan gaya hidup mewah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Islam tidak melarang untuk kaya</li> <li>➢ Kemewahan itu selera dan bersifat subjektif. Tidak ada standar baku. Sehingga lebih merupakan masalah perasaan ketimbang pengetahuan.</li> </ul>
	Kontribusi kader	Merekrut dan membina <i>halaqah</i> .	Mendatangkan uang dan kekuasaan.
	Sebab kemenangan	Citra “bersih” yang melekat	Peningkatan penguasaan

<sup>189</sup>Lihat ‘Ibid Desertasi Arief Munandar “*Antara Jemaah dan Partai Politik, Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*” Hal 97 yang kemudian penulis perbaharui, hal ini dilakukan oleh penulis dikarenakan pada tahun 2013 konstelasi politik internal PKS mengalami perubahan yang cukup signifikan

		pada kader-kader PKS di masa sebelumnya.	terhadap sumber daya, khususnya uang.
5	Persepsi atau label dari kelompok yang bersebrangan.	Gamang, kekanak-kanakan dan tidak menggunakan metodologi yang tepat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membangun kekuatan dengan memanfaatkan uang, termasuk untuk memanipulasi kader.</li> <li>➤ Pembawa “ideologi uang”.</li> <li>➤ Tidak menjaga kehati-hatian dalam mengakses sumber-sumber keuangan partai.</li> </ul>
6	Kekuatan	Ada yang memilih untuk keluar, rehat dari aktivitas partai dan ada pula yang dikeluarkan dari partai serta ada yang masih konsisten bertahan di partai, walaupun berhadapan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemampuan mengakses sumber-sumber dana.</li> <li>➤ Kemampuan mendayagunakan media.</li> <li>➤ Kemampuan membangun wacana dominan.</li> </ul>
7	Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Soliditas ideologis belum teruji.</li> <li>➤ Sering melakukan perlawanan baik di dalam maupun di luar</li> </ul>	Sangat mengandalkan hubungan <i>patron-client</i> dengan pimpinan tertinggi partai.



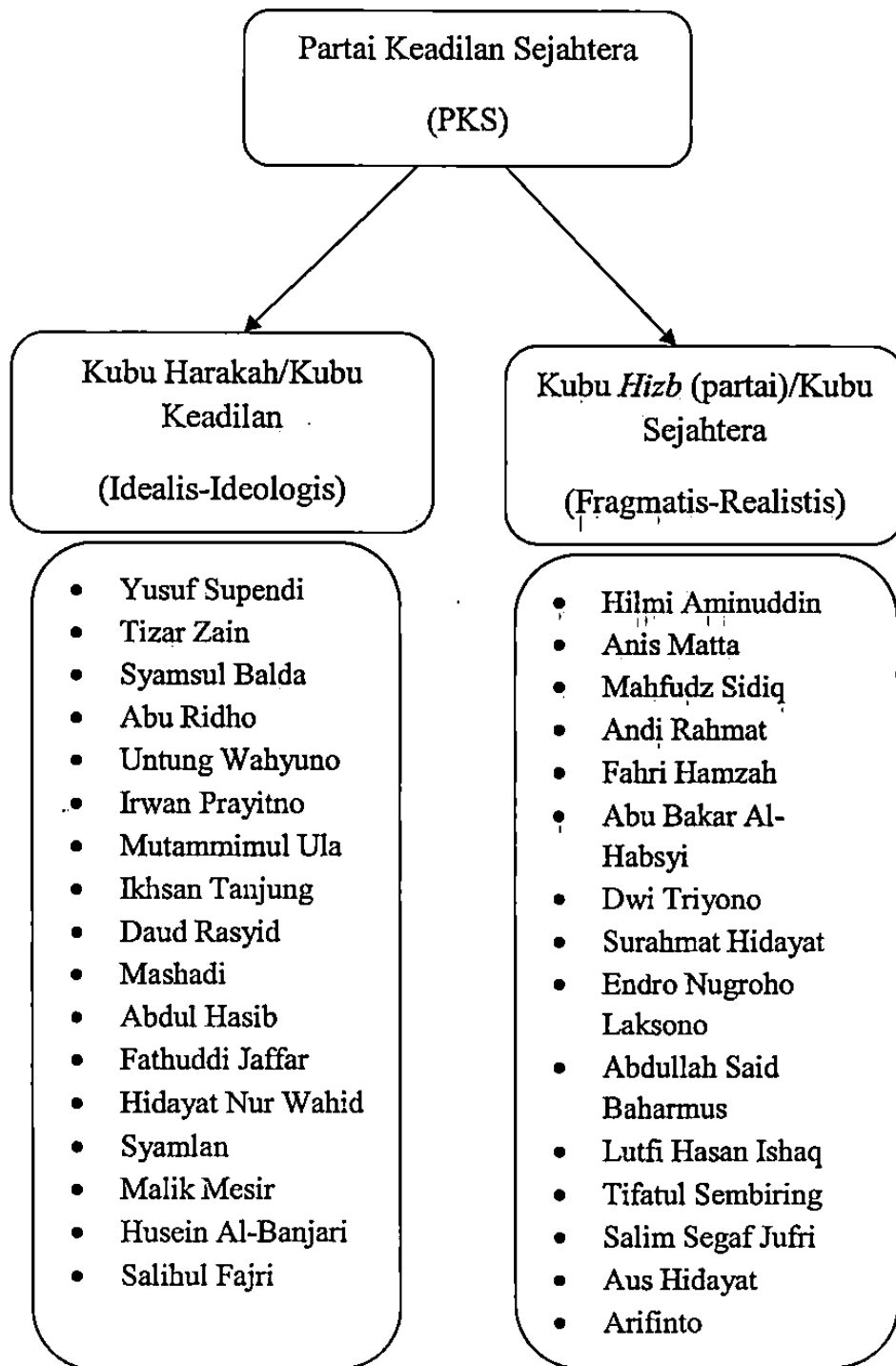
		partai.	
8	Faktor pendukung	Yusuf Supendi yang merupakan salah satu tokoh PK dan PKS yang paling menonjol baik diinternal maupun eksternal kepartaian.	Didukung oleh para pimpinan tertinggi di partai.

Proses pengelompokan kedua kubu tersebut didasarkan pada dinamika elite partai yang berada ditingkatan pusat atau setidaknya terhadap tokoh partai yang berada di daerah. Faksionalisasi ini menjadi nyata terlihat ketika banyak dari kader partai dikeluarkan, mengundurkan diri atau mundur tanpa berita (muntaber). Hal ini terjadi dikarenakan diantara elite partai sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan taktik dan strategi kepartaian. Di satu sisi kubu keadilan berharap partai bisa kembali ke khittah perjuang semula sebagaimana PK dahulu, akan tetapi disisi lain kubu kesejahteraan menganggap kekalahan partai pada pemilu 1999 ketika saat itu masih menjadi PK adalah bukti bahwa partai tidak luwes dalam melihat dinamika politik nasional.

Tarik menarik menifestasi ideologis ini kemudian terkristalisasi ke dalam 2 kubu yang saling bersebrangan, hal ini patut disayangkan karena PKS merupakan partai yang digadang-gadang sebagai partai yang mampu merefresentasikan umat islam dalam kaneah politik nasional agar dapat memperielas prihal kedua kubu

tersebut, penulis akan menyajikan kader dan tokoh senior yang termasuk dalam kedua kubu tersebut, yaitu sebagai berikut:

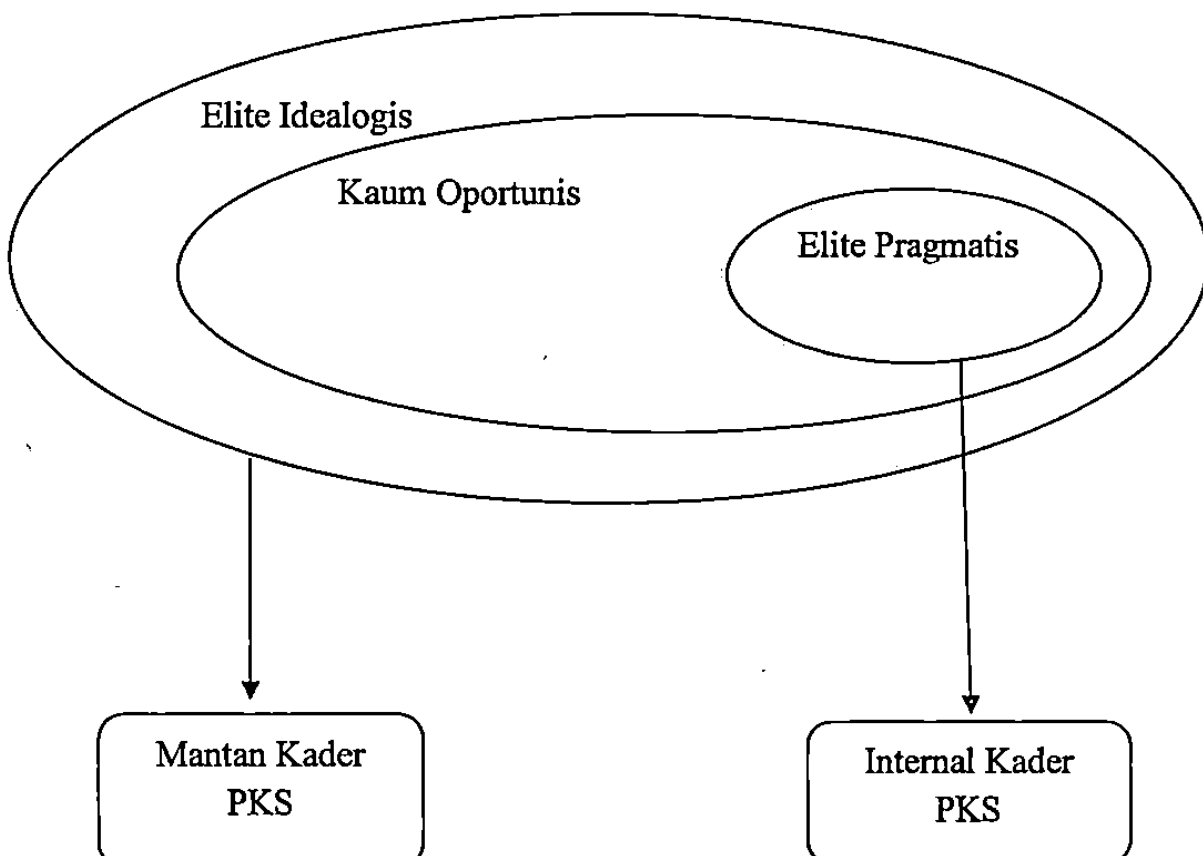
Gambar 3.2 Faksionalisasi Internal Partai Keadilan Sejahtera<sup>190</sup>



<sup>190</sup>Dialah dari berbagai sumber

Faksionalisasi pada tingkatan elite ini kemudian berimbas terhadap kader yang berada di berbagai daerah, untuk dapat memperjelas perihal implikasi politik dari faksionalisasi internal partai tersebut, mari kita simak di bawah ini:

Gambar 3.3 Analogi Orientasi Kader dalam Partai Keadilan Sejahtera, adalah sebagai berikut:



## **2. Pertaruhan Citra Politik PKS Dihadapan Publik**

PKS merupakan partai yang dibentuk oleh sekumpulan aktivis muda mesjid yang terkenal dengan keindahan dalam bertutur kata, kecakapan dalam berdakwah dan kelihaihan dalam politik, setidaknya hal inilah yang mampu membuat umat muslim yang berada di Indonesia merasa tergugah hatinya guna memberikan hak suara pada partai ini, partai yang dianggap mampu untuk mewakili umat islam yang selama ini terjajah oleh keserakahan penguasa dengan menjadikan umat islam hanya sebagai objek elektoral dalam pemilihan umum 5 tahunan.

Akan tetapi, kesan yang terbangun di tengah masyarakat tersebut seakan telah luntur ketika banyak dari petinggi partai yang diduga bahkan ada pula yang terbukti memiliki keterlibatan dalam berbagai kasus yang menyeret para pejabat/petinggi partai, baik itu yang berada di pusat maupun di daerah, setidaknya kasus tersebut meliputi 2 hal, yaitu:

### **a. Kasus Korupsi dan Suap**

Kasus korupsi Gubernur Sumatra Utara, kasus Suropto sebagai tokoh PKS dan mantan Sekjen Kehutanan yang tersangkut kasus pembelian 2 helikopter bekas, skandal kasus suap import daging sapi yang dilakukan oleh Presiden partai Lutfi Hasan Ishak dengan berbonus wanita cantik, yang kemudian hari diduga adanya keterlibatan anak Hilmi Aminuddin serta adanya dugaan kredit lancung yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terpilih

b. Kasus Mahar Politik

Dugaan mahar politik Adang Darajatun untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta sebesar 76 milyar<sup>191</sup>, dugaan pengucuran mahar politik dari Wiranto sebesar 21 Milyard pada tahun 2004, dugaan pemerasan dengan dalih proposal kerja terhadap Inu Kencan pada saat berkeinginan mencalonkan diri sebagai calon walikota payakumbuh, dugaan menerima mahar politik dari Jusuf Kalla sebesar 34 Milyar, hingga dugaan penggelontoran mahar politik dari Foke pada putaran ke II pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta<sup>192</sup>.

Kasus-kasus tersebut memanglah belum semua terbukti, bahkan masih menjadi teka-teki yang sulit untuk dibuktikan, namun persepsi masyarakat sudah terbangun sedemikian kuat, sehingga kesan politik yang diterima masyarakat bahwa PKS tak jauh berbeda dengan partai lain yang gemar merampok uang rakyat.

Kesan yang terbangun tersebut tidak bisa dilepaskan dari citra politik PKS yang sangat berkaitan dengan opini publik, sedangkan opini publik merupakan unsur yang terpenting guna melihat sejauhmana partai bisa menancapkan isu politik ditengah masyarakat. Hal ini setidaknya yang terjadi pada zaman reformasi, berbeda dengan zaman Soeharto yang pada saat itu partai tidak membutuhkan citra politik, karena yang terpenting adalah restu dari presiden Soeharto dan semuanya bisa diatur dengan rapi.

---

<sup>191</sup>Lihat [Http://Www.erasmuslim.Com](http://www.erasmuslim.com) yang diakses pada tanggal 7 April 2013

<sup>192</sup>Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 23 Maret 2013

Pada tataran inilah PKS tengah terjangkit apa yang disebut sebagai *Trial by the press*, hal ini merupakan efek dari sistem demokrasi yang menjadikan kebebasan sebagai panglima di samping keberadaan media sebagai pengadil yang mampu menggiring opini masyarakat, walaupun belum ada keputusan pengadilan akan tetapi opini masyarakat sudah terbangun sedemikian kuat lewat media, yang tentunya hal ini dapat berakibat pada citra partai yang berkembang dihadapan publik.

Di samping permasalahan tersebut, PKS pun kini tengah mengalami turbulensi politik kepartaian, banyak dari kader senior partai yang memilih untuk berada diluar jalur partai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Supendi:

“Perang dingin di internal PKS yang menyebabkan terjadinya pemecatan terhadap sejumlah kader senior, mengundurkan diri dari partai dan kader muntaber (mundur tanpa berita)”<sup>193</sup>.

Tersandungnya kader partai dalam berbagai kasus dan konflik internal partai yang tak berkesudahan ini menurut hemat penulis merupakan iklan buruk yang diberikan PKS kepada masyarakat, terlebih lagi menginjak tahun politik, ketika semua partai sudah mulai bergerak menyusun strategi guna menarik simpati pemilih, PKS malah disibukan dengan berbagai permasalahan yang mendera partai. Bahkan menurut hasil riset media versi Pol-Tracking Institute yang dilakukan terhadap 15 media nasional untuk periode Februari-Maret 2013, PKS menempati pemberitaan kedua dengan persentase 15,9% di bawah Partai Demokrat yang pemberitaannya mencapai 59,4%, yang kemudian diikuti oleh Partai Hanura dengan menduduki

<sup>193</sup>Ucok Wawanegara, Penulis Pada Tanggal 23 Maret 2013

peringkat ketiga sebesar 4,8%. Khusus untuk PKS, dari 929 berita sepanjang bulan februari-maret, hampir separuh atau 457 diantaranya adalah berita kasus hukum yang menyeret mantan Presiden PKS<sup>194</sup>.

Hal ini tentunya secara langsung maupun tidak langsung dapat memperburuk citra partai, dan cita-cita elektoral guna mencapai standar minimal mencapai 3 besar atau 20 persen dalam pemilihan umum pada tahun 2014, sudah semakin menjauh dan mungkin hanyalah fatamorgana yang sulit untuk dibuktikan.

### **3. Pertarungan Terbuka Antara Kubu Keadilan dan Kubu Kesejahteraan.**

Perbedaan persepsi yang terjadi di internal PKS kini telah berubah menjadi gelombang konflik yang sulit untuk diselesaikan. Pertarungan tersebut dapat kita lihat diberbagai media, tak jarang antara satu kubu dengan kubu lainnya saling serang dengan menggunakan berbagai dalih pembenaran agar terkesan apa yang dikatakan adalah kebenaran. Pertentangan ini kemudian semakin memanas dan akhirnya mengerucut ke pengadilan sebagai instrument kenegaraan guna mencari keadilan yang sesungguhnya.

Pelaporan Yusuf Supendi merupakan salah satu bukti nyata bahwa kubu keadilan sudah mulai geram dengan prilaku politik kubu kesejahteraan yang selalu menggunakan kekuasaan sebagai alat guna memonopoli kebenaran. Kegeraman ini terlihat ketika Yusuf Supendi menggugat 13 petinggi partai yang termasuk dalam

daftar orang yang harus dihentikan pergerakannya dalam internal PKS, dengan melayangkan surat terbuka kepada para petinggi partai. Jauh sebelum munculnya surat terbuka tersebut, kubu keadilan sudah melakukan berbagai upaya guna menyadarkan kubu kesejahteraan untuk kembali kepada khittah perjuangan partai dan menghentikan praktik-praktik politik yang merusak partai yang didirikan atas dasar kesamaan keagamaan.

Kubu kesejahteraan pun tak tinggal diam, mereka pun melakukan berbagai upaya guna menghentikan pergerakan kubu keadilan dengan mengeluarkan beberapa orang yang dianggap ikut campur dalam masalah kekuasaan dan keuangan yang dimiliki oleh kubu kesejahteraan. Dikeluarkannya Yusuf Supendi, Syamlan, Haikal dan beberapa kader senior lainnya merupakan bukti pembenaran hal tersebut.

Disamping pemecatan, ada juga kader yang mengundurkan diri secara teratur, mereka mengundurkan diri dari partai karena melihat banyak kedholiman yang terjadi di partai, partai tak lebih dari segerombolan orang yang haus akan kekuasaan dan menisbikan dakwah sebagaimana tujuan partai ini didirikan. Lain halnya dengan kader yang mundur tanpa berita, mereka berfikir lebih baik menyingkirkan diri dari pada berkumpul dengan orang yang sudah keluar dari jalur sebenarnya.

Pertentangan antara kubu keadilan dan kubu kesejahteraan ini memasuki babak baru ketika Yusuf Supendi lewat surat terbukanya menggugat petinggi untuk keluar dari partai dengan ancaman jika tidak keluar masalah ini akan diadakan



kepada Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk membubarkan partai yang didirikan, beliau mengatakan kepada penulis:

“Kalo mereka engga keluar dari partai, liat aja tanggal 3 juni, saya ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi”<sup>195</sup>

Menurut penulis, ancaman ini bukanlah ancaman biasa, dikarenakan ancaman ini berangkat dari kekecewaan yang terakumulasi melewati batas-batas kewajaran, sehingga kecil kemungkinan gugatan ini tidak dilakukan, kecuali jika ada kejadian politik tertentu yang mampu mengurungkan niat sang pengadil.

---

<sup>195</sup>Ucapan Wawancara Penulis Pada Tanggal 30 Maret 2013

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah penulis paparkan di atas, berkenaan dengan Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Tahun 2004-2013 yang ditinjau dari faktor penyebab dan dampak, maka berikut ini penulis akan menyajikan inti permasalahan dari konflik yang terjadi diinternal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setidaknya hal tersebut dapat diidentifikasi dalam 3 hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Perbedaan pandangan dalam mengakumulasi kapital.

Perbedaan pandangan dalam mengakumulasi kapital ini dapat terlihat dari gonjang ganjing keberadaan mahar politik yang terjadi diinternal partai guna mendukung atau mengusung salah satu pasangan calon yang masuk dalam bursa pemilihan umum, kubu keadilan menduga peningkatan kekayaan secara tiba-tiba yang didapatkan oleh kubu kesejahteraan merupakan salah satu bukti nyata keberadaan mahar politik ditubuh PKS.

Di samping hal tersebut, Justifikasi keberadaan mahar politik ini pun berangkat dari perbedaan kekayaan yang menganga lebar diantara kubu keadilan dan kubu kesejahteraan. Kubu kesejahteraan cenderung lebih pariente dengan